

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

TAHUN 2012 – 2018

An Nisa¹

Herniwati Retno Handayani

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

annnisaku@students.undip.ac.id

Abstract

Social welfare is one of the main goal of developing area to achieve a better life. The improvement of social welfare can't be separated from economic activities that is done by all kinds of society, from private area and government area. The purpose of this study was to examine the effect of economic growth, domestic investment, foreign investment, and capital expenditure on social welfare at 2012-2018 in Central Java Province.

This study uses secondary data with cross-section data depends on 29 districts and 6 cities in Central Java Province and time-series data from 2012- 2018. The analytical tool used in estimating the research model is panel data regression with Fixed Effect Model.

The result study is simultaneously, independent variable has an effect to dependent variable. Meanwhile partially, the variable of domestic investment and capital expenditure have significant effect to social welfare while economic growth and foreign investment have no significant effect to the social welfare in Central Java Province.

Keywords: social welfare, human development index, economic growth, domestic investment, foreign investment, capital expenditure, FEM.

PENDAHULUAN

Michael dan Stephen (2006) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Pembangunan manusia merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup layak dan sejahtera. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan

¹ Corresponding Author

agar penduduk mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

BAPPEDA (2008) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”. Salah satu misi yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. Hal ini menjadikan sebuah target untuk menjadikan Jawa Tengah mampu bersaing dengan daerah lain di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa pada umumnya sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam hal kualitas sumber daya manusia.

Namun nyatanya Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada kesenjangan capaian pembangunan manusia yang dinyatakan dengan indeks pembangunan manusia. Di mana kesenjangan dalam pencapaian indeks pembangunan manusia antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut . Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan serta pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kesenjangan inilah yang mengakibatkan masyarakat belum memperoleh peluang pembangunan manusia secara adil dan belum mampu memanfaatkan sumber daya daerahnya secara optimal.

Tabel 1
Urutan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	IPM	No.	Kabupaten/Kota	IPM
1	Kota Semarang	82,72	19	Pati	70,71
2	Kota Salatiga	82,41	20	Cilacap	69,56
3	Kota Surakarta	81,46	21	Rembang	69,46
4	Kota Magelang	78,31	22	Wonogiri	69,37
5	Sukoharjo	76,07	23	Grobogan	69,32
6	Karanganyar	75,54	24	Magelang	69,11
7	Klaten	74,79	25	Pekalongan	68,97
8	Kudus	74,58	26	Temanggung	68,83
9	Kota Tegal	74,44	27	Kebumen	68,80
10	Kota Pekalongan	74,24	28	Purbalingga	68,41
11	Semarang	73,61	29	Blora	67,95
12	Boyolali	73,22	30	Batang	67,86
13	Sragen	72,96	31	Wonosobo	67,81
14	Purworejo	71,87	32	Tegal	67,33
15	Jepara	71,38	33	Banjarnegara	66,54
16	Banyumas	71,30	34	Brebes	65,68
17	Kendal	71,28	35	Pemalang	65,67
18	Demak	71,26		Provinsi Jawa Tengah	71,12

Sumber : BPS Jateng, diolah

Pembangunan suatu wilayah diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, oleh sebab itu semua wilayah menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu tujuan pembangunan wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kemakmuran masyarakat ikut meningkat. Menurut Sukirno (2007), pembangunan manusia diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi merupakan salah satu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Tujuan adanya investasi adalah untuk ekspansi usaha. Menurut Sukirno (2004), Penanaman Modal Asing (PMA) masih digunakan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan.

Strategi alokasi belanja daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dalam rangka meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih di tingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya pembangunan dan perbaikan fasilitas publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Abdul (2002) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah. Sehingga belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan pelayanan fasilitas publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Munir (2008), pertumbuhan ekonomi di samping untuk meningkatkan output, barang dan jasa untuk memenuhi keperluan hidup yang semakin bertambah, juga sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup maupun kualitas hidup masyarakat.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut UU (2007) Nomor 25 Pasal 1, Modal Dalam Negeri adalah modal yang di miliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tersebut adalah kegiatan untuk menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sumber domestik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi pada barang modal tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi dapat meningkatkan penggunaan tenaga kerja serta meningkatkan kemajuan teknologi. Sehingga dalam hal ini PMDN dapat memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri.

Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi asing sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek atau menengah. Investasi asing dalam jangka pendek dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun dalam jangka panjang, PMA akan lebih memberikan keuntungan bagi negara yang mengeluarkan investasi dan keuntungan tidak lagi di peroleh bagi negara bersangkutan. Adanya perusahaan-perusahaan asing juga dapat menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan nasional yang sejenis dengannya. Menurut Mudrajad (2000), apabila perkembangan perusahaan asing tersebut mematikan perusahaan nasional yang ada, maka hal ini akan menimbulkan pengangguran dan menghapuskan mata pencaharian golongan masyarakat tertentu.

Belanja Modal

Menurut PERMENDAGRI (2006), Nomor 13 Pasal 53 Ayat (1), Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut PMK (2015), Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal dipergunakan untuk:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja modal lainnya
6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia (*human development*) pertama kali di perkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dalam *Global Human Development Report*. Konsep ini di sebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP (1994), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Menurut BPS, pengukuran indeks pembangunan manusia memiliki beberapa manfaat dalam penerapannya yaitu :

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis hal ini di karenakan selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga di gunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2012-2018. Jenis data yang digunakan adalah data panel gabungan *cross section* dan *time series* tahun 2012-2018 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Definisi Operasional

1. Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu indikator yang dapat di gunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS (2018), IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam mencapai tiga hal mendasar pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni : Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak yang diukur dalam satuan persen per tahun. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut BPS (2010), Pertumbuhan Ekonomi merupakan persentase laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun serta mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau atau antar provinsi yang dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan yang diukur dalam satuan persen per tahun.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri
PMDN yang digunakan merupakan penanaman Modal Dalam Negeri yang telah disetujui dan telah terealisasi di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan rupiah per tahun.
4. Penanaman Modal Asing
PMA yang digunakan merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk investasi langsung yang sudah terealisasi di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan rupiah per tahun.
5. Belanja Modal
Menurut BPS, mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dana atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang diukur dalam satuan rupiah per tahun.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan *software* Eviews 10. Analisis data panel merupakan kombinasi dari deret waktu (*time-series*) dan kerat lintang (*cross-section*). Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 PMDN_{it} + \beta_3 PMA_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

KM = Kesejahteraan Masyarakat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

PE = Pertumbuhan Ekonomi di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

PMA = Penanaman Modal Asing di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

BM = Belanja Modal di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

β_0 = Intercept

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Parameter yang diduga

i = *cross section*

t = *time series*

ε = error term

Pemilihan Model Data Panel

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan teknik estimasi yang baik digunakan adalah *fixed effect*. Pendekatan efek tetap ini akan menyoro nilai intersep yang mungkin saja bisa berbeda-beda antara unit *cross section*. Pada model pendekatan efek tetap ini menambahkan variabel boneka (*dummy variable*) ke dalam model untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun antar waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deteksi Asumsi Klasik

Dari pengujian asumsi klasik yang dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* ialah sebesar 0,000000 yang mana kurang dari $\alpha = 0,05$ (5%). Hal ini menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi masalah normalitas tersebut, maka perlu dilakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma sehingga diperoleh nilai Probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,010452. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan logaritma data masih tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan uji normalitas di atas, maka untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan asumsi dalil batas tengah (*Central Limit Theorem*), di mana sesuai dengan teori *Central Limit Theorem* (CLT) menyatakan bahwa data dikatakan terdistribusi normal apabila ukuran sampel yang digunakan cukup besar, yaitu lebih dari 30, Ghazali (2005). Sehingga menurut teori tersebut penelitian ini dikatakan berdistribusi normal, hal ini dikarenakan sampel dalam penelitian ini berjumlah 241 sampel atau lebih dari 30 sampel.

2. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Obs*R-squared memiliki nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 yang mana lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (5%). Dengan kata lain dalam model ini terdapat masalah autokorelasi. Untuk mengatasi autokorelasi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan standar diferensiasi dari tingkat dasar menjadi tingkat 1 atau *first different* sehingga diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1390 setelah diestimasi. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi pada model tersebut.
3. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Hasil yang diperlukan dari hasil uji ini adalah Obs*R-squared. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai p-value Obs*R-square 0,1792 > 0,05 sehingga dapat simpulkan dalam penelitian ini tidak ada heteroskedastisitas atau data sudah bersifat homogen.
4. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hasil *correlation matriks* tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen karena seluruh nilai koefisien korelasinya lebih kecil dari 0,8. Maka dapat dikatakan bahwa pada model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Hasil Uji Statistik Analisis Regresi

Tabel 2
Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52.54673	4.375881	12.00826	0.0000
PE	0.049474	0.103227	0.479276	0.6323
PMDN	0.297799	0.076649	3.885218	0.0001
PMA	0.128228	0.076405	1.678267	0.0948
BM	0.656395	0.234156	2.803237	0.0056
R-squared	0.861544	Mean dependent var	69.95577	
Adjusted R-squared	0.835498	S.D. dependent var	4.707264	
S.E. of regression	1.909214	Akaike info criterion	4.278383	
Sum squared resid	736.3102	Schwarz criterion	4.842313	
Log likelihood	-476.5452	Hannan-Quinn criter.	4.505580	
F-statistic	33.07750	Durbin-Watson stat	1.404642	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil regresi *R-squared* sebesar 0,861544. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan belanja modal) mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu indeks pemabangunan manusia sebesar 86,15%. Sedangkan sisanya 13,85% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Sementara itu, hasil uji F menunjukkan hasil F-statistik > F-tabel (33,07750 > 2,41), hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

Sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel bahwa penanaman modal dalam negeri dan belanja modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2018. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2018.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis pertama yang dilakukan pengujian pada penelitian ini adalah pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, di mana dari hasil regresi data panel didapatkan nilai koefisiensi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,049474 dengan nilai signifikansi sebesar 0,6323 yang mana lebih besar dari 0,05. Artinya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,049474% namun tidak secara signifikan.

Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Chaniago dan Rusdi (2016); Rasbin (2012); Mirza (2012); Sari (2016); Ariza (2012) di mana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah akan meningkatkan pula indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula aktivitas ekonomi yang bergerak, sehingga akan berdampak pada tingginya produktifitas yang kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dimana pendapatan inilah yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kehidupan hidup layak.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis selanjutnya yang dilakukan pengujian pada penelitian ini adalah pengaruh variabel penanaman modal dalam negeri terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, di mana dari hasil regresi data panel didapatkan nilai koefisiensi penanaman modal dalam negeri sebesar 0,297799 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0001 yang mana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Artinya, setiap kenaikan penanaman modal dalam negeri sebesar satu juta rupiah akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,297799%.

Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016); Pambudy dan Muhammad (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dapat meningkatkan pembangunan di setiap kabupaten dan kota, selain itu tempat pariwisata yang ada di setiap daerah semakin berkembang pula sehingga hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru guna menyerap tenaga kerja. Dengan demikian maka distribusi pendapatan akan merata dan kesejahteraan akan tercapai.

Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengujian pada variabel penanaman modal asing terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, di mana dari hasil regresi data panel didapatkan nilai koefisiensi penanaman modal asing sebesar 0,128228 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0948 yang mana lebih besar dari 0,05. Artinya, setiap kenaikan penanaman modal asing sebesar 1 juta US dollar maka

akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,128228% namun secara tidak signifikan.

Menurut Akinlo (2004), cukup banyak porsi PMA ditujukan pada industri yang tidak terlalu berkaitan dengan perekonomian domestik. Sehingga hal ini mengindikasikan PMA hanya mengisi kekurangan modal yang tidak dapat ditutupi oleh PMDN. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2014) di mana PMA memiliki pengaruh positif yang artinya apabila PMA meningkat maka IPM juga akan meningkat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengujian pada variabel belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, di mana dari hasil regresi data panel didapatkan nilai koefisiensi belanja modal sebesar 0,656395 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0056 yang mana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Artinya setiap kenaikan belanja modal sebesar 1 ribu rupiah maka akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 0,656395%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012); Pambudy dan Muhammad (2019); Setiawan dan Budiana (2015); Ariza (2012) di mana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi anggaran pemerintah untuk belanja modal maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sehingga dengan adanya belanja modal dari pemerintah guna menyediakan barang publik dalam aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan barang publik lainnya dapat mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan data realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2018 di mana pada belanja modal memiliki pertumbuhan pertahun sebesar 15,18 persen. Di mana kenaikan belanja modal ini sejalan dengan kenaikan indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu yang sama.

Pengaruh Variabel *Dummy* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah melalui indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil analisis *cross section effect* yang tersaji pada Tabel 3 diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Salatiga. Sedangkan untuk daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah berada di Kabupaten Pemasang.

Sehingga dalam hal ini belum sejalan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”. Di mana salah satu misi yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. Namun, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan dengan kesenjangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia antar kabupaten dan kota. Hasil analisis *cross section effect* ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Analisis Cross Section Effect

No.	Kabupaten/Kota	Effect
1	Kab. Cilacap	-3.271287
2	Kab. Banyumas	-1.009546
3	Kab. Purbalingga	-2.806032
4	Kab. Banjarnegara	-5.089669
5	Kab. Kebumen	-2.484400
6	Kab. Purworejo	0.563937
7	Kab. Wonosobo	-2.956235
8	Kab. Magelang	-2.203614
9	Kab. Boyolali	1.457308
10	Kab. Klaten	4.091966
11	Kab. Sukoharjo	2.687469
12	Kab. Wonogiri	-1.254250
13	Kab. Karanganyar	3.292263
14	Kab. Sragen	0.407514
15	Kab. Grobogan	-2.576967
16	Kab. Blora	-3.788511
17	Kab. Rembang	-1.997276
18	Kab. Pati	-0.980121
19	Kab. Kudus	1.910118
20	Kab. Jepara	-0.791747
21	Kab. Demak	-0.651208
22	Kab. Semarang	0.790648
23	Kab. Temanggung	-2.400186
24	Kab. Kendal	-0.546465
25	Kab. Batang	-4.292831
26	Kab. Pekalongan	-3.849376
27	Kab. Pemalang	-6.300566
28	Kab. Tegal	-5.349415
29	Kab. Brebes	-4.585666
30	Kota Magelang	7.822489
31	Kota Surakarta	10.27130
32	Kota Salatiga	11.07455
33	Kota Semarang	7.638988
34	Kota Pekalongan	3.483988
35	Kota Tegal	4.492297

Perbedaan nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tabel di atas disebabkan karena adanya perbedaan kualitas infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perbedaan pendapatan masyarakat di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Penanaman modal asing berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
4. Belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pengaruh positif dan signifikan antara belanja modal dan indeks pembangunan manusia dapat dijadikan acuan bagi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan manajemen pengalokasian pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal, agar alokasi belanja modal dapat digunakan secara efisien dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pengaruh positif dan signifikan antara penanaman modal dalam negeri dengan indeks pembangunan manusia dapat di jadikan sebagai motivasi pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar investor dalam negeri mau berinvestasi di daerahnya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan aktivitas ekonomi.
3. Pertumbuhan ekonomi dan Penanaman Modal Asing di dalam penelitian ini secara parsial menunjukkan hasil tidak signifikan. Hal ini dikarenakan adanya ketidak merataan capaian laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta ketidak merataan capaian PMA antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga perlu adanya peran pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan Penanaman Modal Asing melalui perbaikan infrastruktur dan perijinan investasi.

REFERENSI

- Abdul, H. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Akinlo, A. E. (2004). Foreign direct investment and growth in Nigeria. *Journal of Policy Modeling*, 26.
- Ariza, A. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Potianak.
- BAPPEDA. (2008). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025*. Semarang: Bappeda Jawa Tengah.

- BPS. (2010). *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2012-2018*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2012-2018*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- Chaniago, P., dan Rusdi, M. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Dan Kotaprovisi Bengkulu. *Jurnal Universitas Bengkulu*.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Michael, P. T., dan Stephen, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Jurnal Ekonomi*, 1–15.
- Mudrajad, K. (2000). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munir, S. (2008). Pengantar Ilmu ekonomi Makro: Pertumbuhan Ekonomi (Modul 4). *Jurnal Fakultas Ekonomi Klas Karyawan Universitas Mercu Buana*.
- Nugroho, R. I. (2016). *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Upah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi DIY*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pambudy, Akhlis, P., dan Muhammad, I. S. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekobis*, 20.
- PERMENDAGRI. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PMK. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Rasbin. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Tujuh Provinsi Pemekaran di Indonesia*. 17.
- Sari, D. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Bandar Lampung . *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*.
- Setiawan, G. B. K. P., dan Budiana, D. N. B. (2015). Pengaruh Belanja Modal

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*,
04.

Sitorus, H. Y. (2014). *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Pengeluaran
Pemerintah terhadap IPM dan Kemiskinan*. Skripsi. Universitas Syiah Kuala
Darussalam. Banda Aceh.

Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

_____. (2007). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo.

UNDP. (1994). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.

UU. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal*.